



Distribusi Nilai Tambah Ekonomi untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Studi Kasus Eksploratif di Kabupaten Sukabumi)

Risma Nurmilah^{1*}, Dine Meigawati², Ismet Ismatullah³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Sukabumi

E-mail: risma.nurmilah@ummi.ac.id^{1*}, meigawati@gmail.com², Ismet.ismatullah@ummi.ac.id³

*Penulis Korespondensi: risma.nurmilah@ummi.ac.id¹

Abstract. Sustainable economic development in the food and agriculture sector requires an equitable distribution of value added along the supply chain. However, institutional economics theory (Stiglitz) and value chain theory (Porter, Gereffi) generally predict that farmers occupy a disadvantaged position in food supply chains due to information asymmetry and weak bargaining power, implying a low farmer share of value added and a high degree of inequality between upstream and downstream actors. This exploratory case study examines early indications regarding that expectation on the rice supply chain in Sukabumi Regency using a quantitative approach with a small-scale survey method. Data were analyzed using Value Chain Analysis, Value Added Analysis, Farmer's Share, Marketing Margin, and an Inequality Index. Within the scope of this case study, results based on cash production costs diverge from the theoretical expectation. Farmers receive the largest share of value added, at 56.4 percent of the total, and an Inequality Index of 0.774 indicates that downstream income has not yet exceeded farmers' income. However, a sensitivity analysis shows that this finding reverses once unpaid family labor is imputed: the farmers' share of value added falls to 48.2 percent and the Inequality Index rises to 1.074, indicating that downstream income slightly exceeds farmers' income. Regardless of the sensitivity of the value-added results, the study consistently finds that the real constraint lies in local institutions: 70 percent of farmers are unaware of the village-owned enterprise (BUMDes) as a potential marketing partner, even though every surveyed BUMDes expressed willingness to act as an offtaker. This suggests that the main barrier to equitable but also involves weak information dissemination and institutional trust. Given the limited sample size and the sensitivity of results to the cost basis used, these findings are indicative and warrant further testing at a larger scale. The study recommends strengthening local institutions to improve market certainty for farmers.

Keywords: Farmer's Share; Local Institution; Sustainable Development; Value Added; Value Chain.

Abstrak. Pembangunan ekonomi berkelanjutan pada sektor pertanian pangan menuntut distribusi nilai tambah yang adil di sepanjang rantai pasok. Namun, kerangka teori ekonomi kelembagaan (Stiglitz) dan rantai nilai (Porter, Gereffi) umumnya memperkirakan bahwa petani berada pada posisi yang dirugikan dalam rantai pasok pangan akibat asimetri informasi dan lemahnya posisi tawar, sehingga porsi nilai tambah yang diterima petani diduga kecil dan tingkat ketimpangan antara hulu dan hilir diduga tinggi. Penelitian ini bersifat studi kasus eksploratif yang mengeksplorasi indikasi awal atas dugaan tersebut pada rantai pasok beras di Kabupaten Sukabumi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei skala kecil. Data dianalisis menggunakan Value Chain Analysis, Value Added Analysis, Farmer's Share, Marketing Margin, dan Inequality Index. Pada skala studi kasus ini, hasil penelitian pada basis biaya produksi tunai menunjukkan indikasi awal yang berbeda dari dugaan teori tersebut. Petani menerima porsi nilai tambah terbesar, yaitu 56,4 persen dari total nilai tambah rantai pasok, dan nilai Inequality Index sebesar 0,774 menunjukkan bahwa pendapatan pelaku hilir belum melampaui pendapatan petani. Namun, analisis sensitivitas menunjukkan bahwa temuan ini berbalik setelah biaya tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar tunai diimputasikan: porsi nilai tambah petani turun menjadi 48,2 persen dan Inequality Index naik menjadi 1,074, sehingga pendapatan pelaku hilir justru sedikit melampaui pendapatan petani. Farmer's Share dihitung dengan dua cara untuk memperjelas gambaran ini. Terlepas dari sensitivitas hasil nilai tambah, penelitian ini menemukan bahwa persoalan nyata yang konsisten pada rantai pasok ini justru terletak pada aspek kelembagaan: 70 persen petani belum mengetahui keberadaan BUMDes sebagai calon mitra pemasaran, padahal seluruh BUMDes yang disurvei menyatakan kesediaannya menjadi offtaker gabah. Temuan ini mengindikasikan bahwa hambatan utama hilirisasi beras adalah lemahnya diseminasi informasi dan penguatan kepercayaan kelembagaan. Mengingat ukuran sampel yang terbatas dan sensitivitas hasil terhadap basis perhitungan biaya, temuan ini bersifat indikatif dan perlu diuji lebih lanjut pada cakupan yang lebih luas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran kelembagaan lokal untuk meningkatkan kepastian pasar bagi petani.

Kata kunci: Farmer's Share; Kelembagaan Lokal; Nilai Tambah; Pembangunan Berkelanjutan; Rantai Nilai.

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah penghasil padi utama di Provinsi Jawa Barat. Produksi padi yang tinggi seharusnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani. Namun, pada kenyataannya, kesejahteraan petani masih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam distribusi nilai ekonomi di sepanjang rantai pasok beras. Secara lebih luas, pemilihan saluran pemasaran dan struktur hubungan antarpelaku dalam rantai pertanian dapat memengaruhi manfaat ekonomi dan kesejahteraan yang diterima produsen (Jusni & Aswan, 2021). Pada industri beras Indonesia, struktur pengolahan dan hubungan antarpelaku juga menjadi bagian penting dalam menentukan kinerja ekonomi rantai pasok (Bahri et al., 2021).

Persoalan ini erat kaitannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* [SDGs]) kedua tentang tanpa kelaparan dan ketahanan pangan, serta tujuan kedelapan tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan produksi, tetapi juga oleh kemampuan sistem pangan dalam menopang keberlanjutan ekonomi dan penghidupan produsen pertanian (Ndwandwe et al., 2026; Yigezu et al., 2026). Transformasi rantai nilai agrifood yang berkelanjutan juga membutuhkan penguatan aspek ekonomi, kelembagaan, dan tata kelola agar manfaat yang dihasilkan dapat terdistribusi secara lebih baik di antara para pelaku rantai nilai (Hidayati et al., 2023). Dengan demikian, pembangunan pertanian yang berkelanjutan menuntut agar petani sebagai produsen utama turut menikmati nilai tambah yang dihasilkan, bukan hanya berperan sebagai penyedia bahan baku murah bagi pelaku hilir.

Dalam rantai pasok beras, terdapat beberapa pelaku yang terlibat, yaitu petani, penggilingan padi, dan pedagang. Setiap pelaku menerima bagian nilai tambah yang berbeda-beda. Struktur dan kinerja industri pengolahan beras menunjukkan bahwa kegiatan pada tahap pengolahan memiliki hubungan yang penting dengan penciptaan nilai dalam rantai pasok (Bahri et al., 2021). Di sisi lain, pilihan saluran pemasaran dapat berhubungan dengan manfaat ekonomi yang diterima produsen pertanian (Jusni & Aswan, 2021). Penelitian mengenai industri beras di Indonesia juga menunjukkan pentingnya persoalan distribusi nilai antarpelaku serta penguatan kelembagaan untuk mencapai distribusi manfaat ekonomi yang lebih berkeadilan (Ritonga et al., 2026). Dengan demikian, petani sebagai produsen utama berpotensi menerima bagian nilai ekonomi yang berbeda dibandingkan penggilingan maupun pedagang, tergantung pada struktur rantai pasok dan mekanisme distribusi nilai yang terbentuk.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi nilai pada komoditas pertanian berkaitan dengan lemahnya posisi produsen, hambatan pasar, dan struktur atau panjangnya rantai distribusi (Balanay & Guinancias, 2025; Chuma et al., 2026; Zinyoro et al., 2025). Upaya memperpendek dan memperbaiki struktur rantai pasok berpotensi meningkatkan ketahanan usaha pertanian dan akses produsen terhadap pasar (Balanay & Guinancias, 2025). Selain itu, kendala kelembagaan dapat membatasi transformasi pertanian skala kecil dan keberlanjutan rantai nilai (Hidayati et al., 2023; Mhando, 2026). Pada industri beras di Indonesia, penguatan kelembagaan juga dikaitkan dengan upaya mencapai distribusi nilai yang lebih adil di antara pelaku rantai pasok (Ritonga et al., 2026). Stabilitas dan mekanisme pasar beras sendiri merupakan aspek penting dalam kebijakan pangan Indonesia (Ruspayandi et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian mengenai distribusi nilai tambah pada rantai pasok beras penting dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani sekaligus memperkuat efisiensi dan keberlanjutan rantai pasok.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis struktur rantai nilai beras di Kabupaten Sukabumi; (2) menghitung nilai tambah pada setiap simpul rantai pasok; (3) menghitung *Farmer's Share* dengan dua pendekatan perhitungan; dan (4) menghitung tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antara pelaku hulu dan hilir.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif berbasis survei telah digunakan dalam penelitian rantai nilai agrifood untuk mengidentifikasi karakteristik pelaku, tata kelola, penciptaan nilai tambah, serta faktor yang memengaruhi transformasi rantai nilai pertanian (Hidayati et al., 2023). Penelitian dilakukan di lima kecamatan sentra padi di Kabupaten Sukabumi, yaitu Kecamatan Cirenghas, Kadudampit, Kebonpedes, Selabintana, dan Jampang.

Responden penelitian terdiri atas tiga kelompok pelaku rantai pasok, yaitu 10 orang petani, 5 unit usaha penggilingan padi, dan 5 orang pedagang beras. Identifikasi pelaku pada tahapan produksi, pengolahan, dan distribusi merupakan bagian dari pemetaan rantai pasok untuk menggambarkan aliran produk serta hubungan ekonomi antarpelaku (Balanay & Guinancias, 2025). Selain itu, penelitian ini juga melibatkan 3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai calon mitra kelembagaan. Pelibatan kelembagaan lokal relevan karena penguatan institusi dapat memengaruhi hubungan antarpelaku dan distribusi manfaat ekonomi dalam rantai nilai pertanian (Mhando, 2026; Ritonga et al., 2026). Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur, wawancara, dan observasi lapangan. Pendekatan berbasis wawancara

terstruktur juga digunakan dalam penelitian rantai nilai agrifood untuk memperoleh informasi langsung dari pelaku utama rantai nilai (Hidayati et al., 2023).

Data yang dikumpulkan meliputi harga jual, biaya produksi, biaya pengolahan, biaya distribusi, dan volume transaksi pada setiap simpul rantai pasok. Variabel harga, biaya, pendapatan, dan saluran pemasaran merupakan komponen yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dan efisiensi saluran pemasaran produk pertanian (Jusni & Aswan, 2021). Data kemudian dianalisis menggunakan lima alat analisis kuantitatif, yaitu *Value Chain Analysis*, *Value Added Analysis*, *Farmer's Share*, *Marketing Margin*, dan *Inequality Index*. Analisis rantai pasok dan pemetaan pelaku dapat digunakan untuk menilai distribusi aktivitas produksi, pengolahan, dan pemasaran (Balanay & Guinancias, 2025), sedangkan analisis *Farmer's Share* dan efisiensi pemasaran relevan untuk menilai distribusi nilai antara petani dan pelaku lain dalam rantai industri beras (Ritonga et al., 2026).

Value Added (nilai tambah) dihitung dengan mengurangkan nilai output dengan nilai input pada setiap simpul rantai. Analisis nilai tambah diperlukan untuk mengidentifikasi besarnya nilai ekonomi baru yang terbentuk pada setiap tahapan rantai nilai. Dalam industri pengolahan beras, penggilingan merupakan salah satu pelaku utama yang menciptakan nilai tambah melalui proses transformasi gabah menjadi produk beras (Bahri et al., 2021). Pendekatan analisis nilai tambah juga menjadi salah satu dimensi penting dalam evaluasi transformasi rantai nilai agrifood (Hidayati et al., 2023). Rumus yang digunakan adalah:

$$VA = P_{output} - P_{input}$$

Biaya produksi petani yang dilaporkan pada survei merupakan biaya tunai aktual dan tidak mencakup biaya tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar tunai, sebagaimana lazim terjadi pada usaha tani skala kecil. Untuk mengevaluasi sensitivitas hasil terhadap keterbatasan ini, penelitian ini turut menghitung *Value Added* dengan tambahan biaya tenaga kerja keluarga yang diimputasikan menggunakan upah acuan setempat sebesar Rp1.500.000 per bulan untuk satu tenaga kerja per rumah tangga, dengan lama masa tanam-panen sekitar 4 bulan, sehingga total biaya tenaga kerja yang diimputasikan adalah Rp6.000.000 per musim tanam. Nilai ini kemudian dikonversi ke basis per kilogram menggunakan volume produksi rata-rata dan rendemen penggilingan, lalu ditambahkan pada biaya produksi tunai yang telah dilaporkan.

Farmer's Share (FS) dihitung dengan membandingkan harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar konsumen akhir. Penggunaan *Farmer's Share* relevan untuk mengevaluasi proporsi harga akhir yang diterima produsen serta distribusi manfaat ekonomi dalam saluran pemasaran produk pertanian (Jusni & Aswan, 2021; Ritonga et al., 2026). Pada industri beras, indikator ini juga digunakan untuk menilai efisiensi pemasaran serta distribusi

pendapatan yang diterima petani pada berbagai simpul rantai pasok (Ritonga et al., 2026). Rumus yang digunakan adalah:

$$FS = (P_{\text{petani}} / P_{\text{konsumen}}) \times 100\%$$

Penelitian ini menghitung *Farmer's Share* dengan dua cara. Cara pertama disebut *Farmer's Share Tidak Disesuaikan*, yaitu membandingkan langsung harga gabah yang diterima petani dengan harga beras di tingkat konsumen tanpa penyesuaian satuan. Cara ini merepresentasikan uang tunai yang benar-benar diterima petani. Cara kedua disebut *Farmer's Share Disesuaikan (Setara Beras)*, yaitu mengonversi terlebih dahulu harga gabah petani menjadi harga setara satu kilogram beras menggunakan rendemen penggilingan, dengan rumus berikut:

$$P_{\text{petani}} (\text{setara beras}) = P_{\text{petani}} (\text{gabah}) / \text{Rendemen}$$

Konversi ini diperlukan karena satu kilogram gabah tidak setara dengan satu kilogram beras akibat proses penggilingan. Tahap penggilingan merupakan proses transformasi penting dalam industri beras yang menciptakan nilai tambah dan mengubah karakteristik ekonomi produk dari bahan baku menjadi produk akhir (Bahri et al., 2021). Cara kedua ini merepresentasikan porsi nilai ekonomi produk akhir yang bersumber dari tahap usaha tani, tetapi bukan uang tunai yang benar-benar diterima petani.

Marketing Margin (MP) dihitung dengan mengurangkan harga di tingkat konsumen dengan harga di tingkat petani. Analisis margin pemasaran digunakan untuk mengevaluasi perbedaan harga serta manfaat ekonomi yang terbentuk di sepanjang saluran pemasaran. Perbedaan aktivitas dan biaya pada masing-masing saluran pemasaran dapat menghasilkan margin yang berbeda antarpelaku (Jusni & Aswan, 2021). Analisis terhadap struktur rantai pasok juga memungkinkan identifikasi biaya dan nilai ekonomi yang terbentuk pada tahapan produksi, pengolahan, serta distribusi (Balanay & Guinancias, 2025). Rumus yang digunakan adalah:

$$MP = P_{\text{konsumen}} - P_{\text{petani}}$$

Inequality Index (I) digunakan untuk membandingkan pendapatan pelaku hilir dengan pendapatan pelaku hulu. Analisis perbandingan distribusi nilai antara petani dan pelaku hilir relevan karena struktur kelembagaan dan rantai pemasaran dapat menghasilkan pembagian nilai ekonomi yang berbeda antarpelaku (Ritonga et al., 2026). Rumus yang digunakan adalah:

$$I = Y_{\text{hilir}} / Y_{\text{hulu}}$$

Nilai *I* yang mendekati satu menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata antara hulu dan hilir. Nilai *I* yang jauh lebih besar dari satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi karena pelaku hilir menerima pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan petani.

Indikator ini digunakan sebagai ukuran operasional dalam penelitian ini untuk membandingkan distribusi nilai antara kedua kelompok pelaku.

Seluruh data dianalisis pada basis rata-rata setiap kelompok pelaku. Data merepresentasikan gambaran struktur rantai nilai yang tipikal pada skala studi kasus eksploratif di kecamatan pilot, bukan estimasi populasi Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan. Penggunaan pemetaan rantai pasok pada kelompok pelaku tertentu dapat memberikan gambaran eksploratif mengenai struktur produksi, pengolahan, distribusi, serta hubungan ekonomi antarpelaku, tetapi interpretasinya perlu disesuaikan dengan cakupan sampel penelitian (Balanay & Guinancias, 2025; Hidayati et al., 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Petani responden memiliki luas lahan rata-rata 0,93 hektare dengan status penguasaan lahan yang terbagi rata antara milik sendiri (50 persen) dan bagi hasil (50 persen). Produksi gabah rata-rata sebesar 4.943 kilogram per musim tanam, dengan produktivitas rata-rata 5.660 kilogram per hektare.

Sebagian besar petani menjual gabah kepada pengumpul, yaitu sebanyak 70 persen dari total responden. Hanya sebagian kecil petani yang menjual langsung kepada penggilingan atau pedagang. Temuan penting lain adalah rendahnya pengetahuan petani terhadap keberadaan BUMDes. Sebanyak 70 persen petani menyatakan tidak mengetahui keberadaan BUMDes di desanya, dan hanya 20 persen petani yang menyatakan bersedia atau sangat bersedia menjual gabah melalui BUMDes.

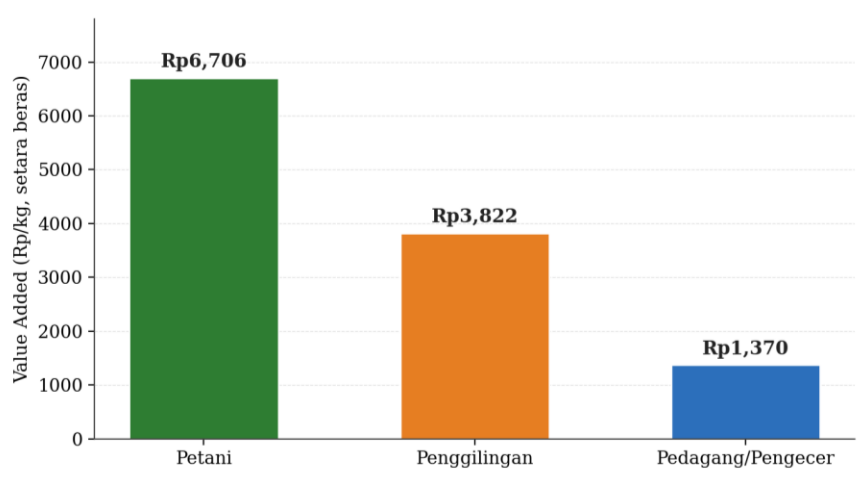
Analisis Value Added per Simpul Rantai

Hasil perhitungan Value Added pada setiap simpul rantai pasok disajikan pada Tabel 1. Perhitungan menggunakan basis setara satu kilogram beras dengan rendemen rata-rata penggilingan sebesar 64,8 persen.

Tabel 1. Value Added pada Setiap Simpul Rantai Pasok Beras (Berbasis Biaya Produksi Tunai)

Simpul Rantai	Harga (Rp/kg, setara beras)	Value Added (Rp/kg)	Kontribusi thd Total VA (%)
Petani	9.120	6.706	56,4
Penggilingan	13.800	3.822	32,1
Pedagang/Pengecer	15.200	1.370	11,5
Total	-	11.898	100,0

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada basis biaya produksi tunai, petani menerima bagian nilai tambah terbesar, yaitu 56,4 persen dari total nilai tambah rantai pasok. Penggilingan menerima 32,1 persen, dan pedagang menerima 11,5 persen. Perlu ditekankan bahwa biaya produksi yang digunakan pada Tabel 1 hanya mencakup biaya tunai yang benar-benar dikeluarkan petani, dan tidak memasukkan biaya tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar tunai, sebagaimana lazim terjadi pada usaha tani skala kecil. Selain itu, petani dalam praktiknya menjual hasil panen dalam bentuk gabah, bukan beras, dan hanya menerima Rp5.910 per kilogram gabah (lihat FS Tidak Disesuaikan pada bagian 3.3, sebesar 38,9 persen), sehingga angka 56,4 persen pada Tabel 1 sebaiknya dibaca sebagai ukuran kontribusi ekonomi per unit produk akhir, bukan sebagai pendapatan tunai riil yang diterima petani.



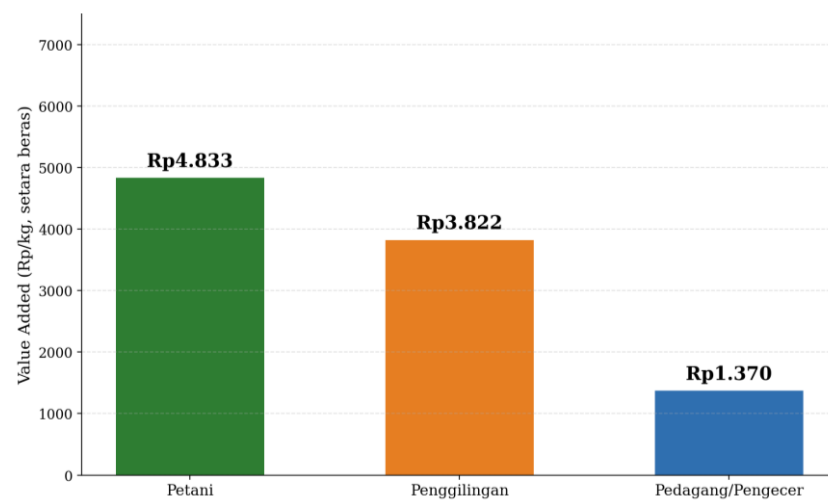
Gambar 1. Distribusi Value Added per Smpul Rantai Pasok Beras

Untuk mengevaluasi seberapa besar temuan ini dipengaruhi oleh tidak diperhitungkannya biaya tenaga kerja keluarga, penelitian ini menghitung ulang Value Added dengan menambahkan biaya tenaga kerja keluarga yang diimputasikan sebesar Rp1.500.000 per bulan untuk satu tenaga kerja per rumah tangga selama masa tanam-panen sekitar 4 bulan (Rp6.000.000 per musim tanam), dikonversi ke basis Rp per kilogram setara beras. Hasil perhitungan yang telah disesuaikan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Value Added pada Setiap Smpul Rantai Pasok Beras (Disesuaikan dengan Biaya Tenaga Kerja Keluarga)

Smpul Rantai	Harga (Rp/kg, setara beras)	Value Added (Rp/kg)	Kontribusi thd Total VA (%)
Petani	9.120	4.833	48,2
Penggilingan	13.800	3.822	38,1
Pedagang/Pengecer	15.200	1.370	13,7
Total	-	10.025	100,0

Setelah biaya tenaga kerja keluarga diperhitungkan, Value Added petani turun dari Rp6.706 menjadi Rp4.833 per kilogram setara beras, dan porsi kontribusinya terhadap total Value Added turun dari 56,4 persen menjadi 48,2 persen. Sebaliknya, porsi kontribusi penggilingan naik dari 32,1 persen menjadi 38,1 persen, dan pedagang dari 11,5 persen menjadi 13,7 persen, karena Value Added kedua simpul tersebut tidak berubah sementara total Value Added rantai pasok mengecil. Petani tetap menerima porsi Value Added terbesar pada kedua basis perhitungan, tetapi jarak keunggulannya terhadap penggilingan menyempit signifikan (dari 24,3 menjadi 10,1 poin persentase) setelah biaya tenaga kerja keluarga turut diperhitungkan. Sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian 3.5, penyesuaian ini turut berdampak pada Inequality Index.



Gambar 2. Distribusi Value Added per Simpul Rantai Pasok Beras
(Disesuaikan dengan Biaya Tenaga Kerja Keluarga)

Analisis Farmer's Share: Perbandingan Dua Pendekatan

Penelitian ini menghitung Farmer's Share dengan dua cara untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Hasil kedua perhitungan disajikan pada Tabel 3.

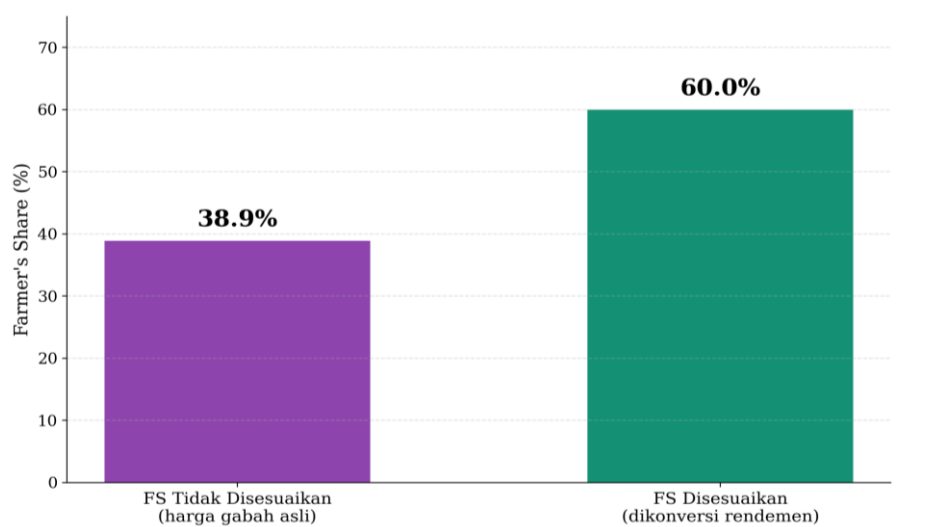
Tabel 3. Perbandingan Farmer's Share Tidak Disesuaikan dan Farmer's Share Disesuaikan
(Setara Beras)

Pendekatan	P Petani (Rp/kg)	P Konsumen (Rp/kg)	Farmer's Share (%)
FS Tidak Disesuaikan	5.910 (harga gabah asli)	15.200	38,9
FS Disesuaikan	9.120 (gabah dikonversi rendemen)	15.200	60,0

Pendekatan pertama, yaitu Farmer's Share Tidak Disesuaikan, membandingkan langsung harga gabah yang diterima petani dengan harga beras di tingkat konsumen. Hasilnya sebesar 38,9 persen. Angka ini merepresentasikan uang tunai yang benar-benar diterima petani, karena dalam praktiknya petani menjual produknya dalam bentuk gabah, bukan beras.

Pendekatan kedua, yaitu Farmer's Share Disesuaikan (Setara Beras), mengonversi harga gabah menjadi harga setara satu kilogram beras menggunakan rendemen penggilingan sebesar 64,8 persen. Hasilnya sebesar 60,0 persen. Angka ini secara metodologis diperlukan untuk membandingkan nilai pada satuan produk yang sama di sepanjang rantai pasok, tetapi angka tersebut bukan pendapatan tunai yang diterima petani, melainkan nilai yang menggambarkan porsi kontribusi tahap usaha tani terhadap nilai produk akhir.

Selisih sebesar 21,1 poin persentase antara kedua pendekatan ini murni bersumber dari perbedaan satuan perhitungan, bukan dari perbedaan data. Penelitian ini merekomendasikan agar kedua angka tetap dilaporkan secara bersamaan pada setiap kajian rantai nilai yang melibatkan proses transformasi fisik produk, seperti pada komoditas gabah menjadi beras.



Gambar 3. Perbandingan Farmer's Share Tidak Disesuaikan dan Disesuaikan

Analisis Margin Pemasaran

Marketing Margin total rantai pasok beras adalah sebesar Rp6.080 per kilogram, yang merupakan selisih antara harga konsumen (Rp15.200 per kilogram) dengan harga petani setara beras (Rp9.120 per kilogram). Rincian distribusi margin pada setiap simpul disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Marketing Margin Antar Pelaku

	Margin (Rp/kg)	Kontribusi thd Margin Total (%)
Penggilingan	3.822	62,9
Pedagang/Pengecer	1.370	22,5
Biaya distribusi & lainnya	888	14,6
Total Margin	6.080	100,0

Tabel 4 menunjukkan bahwa penggilingan menyerap porsi margin terbesar, yaitu 62,9 persen dari total margin pemasaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses pengolahan gabah menjadi beras merupakan titik yang paling banyak menciptakan sekaligus menyerap

nilai tambah dalam rantai pasok, sehingga menjadi titik strategis untuk intervensi kebijakan hilirisasi berbasis kelembagaan lokal.

Analisis Inequality Index

Inequality Index dihitung dengan membandingkan pendapatan pelaku hilir (penggilingan dan pedagang) dengan pendapatan pelaku hulu (petani). Mengikuti perlakuan pada bagian 3.2, indeks ini dihitung pada dua basis Value Added: berbasis biaya produksi tunai (Tabel 1) dan disesuaikan dengan biaya tenaga kerja keluarga (Tabel 2).

$$I \text{ (berbasis biaya tunai)} = Y_{\text{hilir}} / Y_{\text{hulu}} = 5.192 / 6.706 = 0,774$$

$$I \text{ (d disesuaikan tenaga kerja)} = Y_{\text{hilir}} / Y_{\text{hulu}} = 5.192 / 4.833 = 1,074$$

Pada basis biaya produksi tunai, nilai Inequality Index sebesar 0,774 (di bawah satu) menunjukkan bahwa pendapatan pelaku hilir secara agregat belum melampaui pendapatan petani, dengan petani memegang porsi Value Added terbesar secara individual. Namun, setelah biaya tenaga kerja keluarga diperhitungkan, Inequality Index naik menjadi 1,074 (di atas satu) yang berarti kesimpulan berbalik: pendapatan pelaku hilir secara agregat sedikit melampaui pendapatan petani. Pembalikan ini menunjukkan bahwa temuan "petani tidak dirugikan" pada basis biaya tunai sangat sensitif terhadap perlakuan biaya tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar tunai, dan bahwa dugaan awal penelitian berdasarkan kerangka teori market failure justru lebih sejalan dengan hasil pada basis yang telah disesuaikan ini.

Kesiapan Kelembagaan BUMDes

Meskipun distribusi nilai tambah pada rantai pasok relatif berimbang, penelitian ini menemukan bahwa kendala utama justru berada pada aspek kelembagaan. Sebanyak 70 persen petani tidak mengetahui keberadaan BUMDes, dan mayoritas petani (50 persen) masih ragu untuk menjual hasil panennya melalui BUMDes. Di sisi lain, seluruh BUMDes yang menjadi responden menyatakan bersedia atau sangat bersedia berperan sebagai offtaker gabah, dengan syarat utama berupa kepastian pasar, ketersediaan modal, dan dukungan pemerintah daerah.

Kesenjangan antara kesiapan BUMDes dan rendahnya pengetahuan petani ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam rantai pasok beras di Kabupaten Sukabumi bukan semata soal distorsi harga sebagaimana diperkirakan sebelumnya, melainkan lebih kepada lemahnya diseminasi informasi dan penguatan kepercayaan antara petani dan lembaga lokal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam menafsirkan hasil. Pertama, ukuran sampel tergolong kecil (10 petani, 5 penggilingan, 5 pedagang, dan 3 BUMDes) dan dipusatkan pada satu kecamatan pilot, sehingga hasil penelitian bersifat eksploratif dan tidak dapat digeneralisasi sebagai estimasi populasi Kabupaten

Sukabumi secara keseluruhan. Ukuran sampel ini juga tidak memungkinkan dilakukannya uji signifikansi statistik atas hasil yang diperoleh.

Kedua, data yang digunakan bersifat cross-sectional dan dihitung pada basis rata-rata setiap kelompok pelaku, bukan data transaksi yang tertelusur (traced) dari petani yang sama hingga ke konsumen akhir. Akibatnya, angka Value Added dan Farmer's Share pada penelitian ini menggambarkan struktur rantai nilai yang tipikal, bukan margin riil pada satu jalur transaksi tertentu.

Ketiga, model transmisi harga (price transmission) yang direncanakan pada tahap awal penelitian tidak dapat dijalankan, karena estimasi regresi memerlukan data harga time series, sedangkan data yang tersedia hanya berupa potret harga pada satu titik waktu. Analisis elastisitas transmisi harga secara ekonometrik disarankan menjadi agenda penelitian lanjutan dengan data deret waktu.

Keempat, biaya produksi yang dilaporkan petani pada Tabel 1 tidak mencakup biaya tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar tunai, sebagaimana lazim terjadi pada survei usaha tani skala kecil. Penelitian ini telah mengevaluasi sensitivitas temuan terhadap keterbatasan ini melalui imputasi biaya tenaga kerja keluarga pada bagian 3.2 dan 3.5, yang menunjukkan bahwa kesimpulan mengenai posisi ekonomi petani berbalik arah setelah penyesuaian tersebut. Meskipun demikian, angka upah acuan (Rp1.500.000 per bulan) dan asumsi satu tenaga kerja per rumah tangga yang digunakan dalam imputasi ini masih bersifat perkiraan, bukan hasil pencatatan langsung curahan waktu kerja keluarga di lapangan (mis. dalam satuan hari orang kerja), sehingga hasil analisis sensitivitas ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan data curahan tenaga kerja yang lebih rinci. Hal ini tidak memengaruhi perhitungan Farmer's Share yang berbasis rasio harga, bukan biaya produksi.

Diskusi Kritis: Temuan Empiris versus Ekspektasi Teori

Kerangka teori yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu *market failure* (Stiglitz), tata kelola rantai nilai (Gereffi), dan analisis rantai nilai (Porter), pada umumnya memperkirakan bahwa petani berada pada posisi yang dirugikan akibat asimetri informasi dan lemahnya posisi tawar terhadap pelaku hilir. Berdasarkan kerangka ini, penelitian awalnya menduga bahwa Farmer's Share akan rendah dan Inequality Index akan jauh di atas satu. Namun, hubungan antara kegagalan pasar dan kesejahteraan produsen tidak selalu bersifat linier. Velázquez-Torres et al. (2025), misalnya, menunjukkan pada usaha tani mawar di Meksiko bahwa suatu sektor pertanian tetap dapat kompetitif dan layak secara finansial meskipun berada dalam lingkungan kebijakan dan pasar yang mengalami distorsi. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan antara profitabilitas privat dan sosial, sehingga kondisi

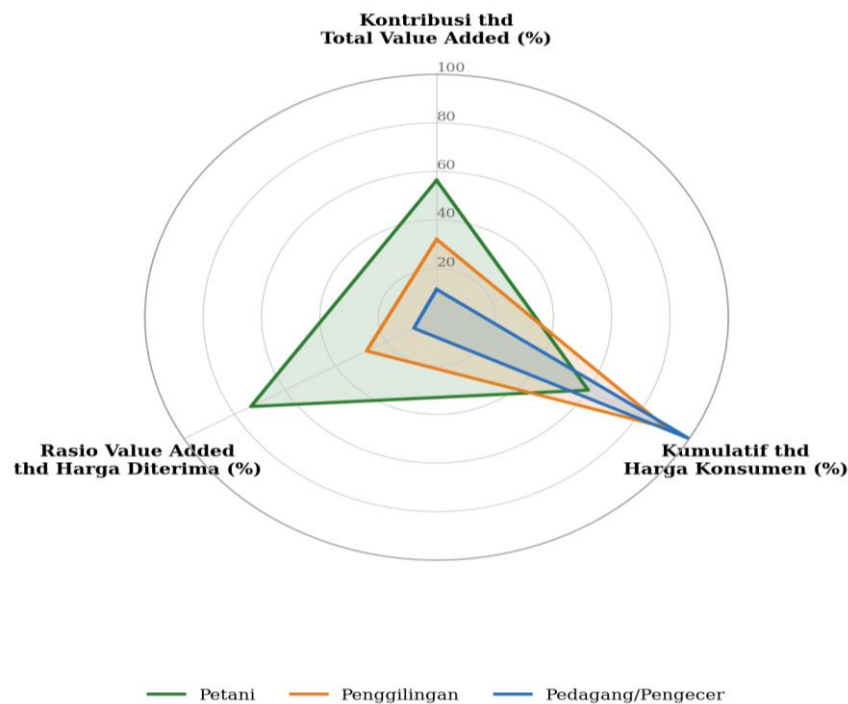
ekonomi produsen sangat dipengaruhi oleh cara biaya, harga, dan faktor produksi diperhitungkan. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa keberadaan distorsi pasar tidak secara otomatis berarti produsen primer selalu memperoleh proporsi nilai ekonomi yang paling kecil.

Temuan empiris penelitian ini pada basis biaya produksi tunai tidak sepenuhnya sejalan dengan dugaan teoritis tersebut. Petani menerima porsi Value Added terbesar, yaitu 56,4%, sedangkan Inequality Index sebesar 0,774 menunjukkan bahwa pendapatan pelaku hilir secara agregat belum melampaui pendapatan petani. Bahkan pada perhitungan Farmer's Share yang paling konservatif, yaitu Farmer's Share Tidak Disesuaikan sebesar 38,9%, ketimpangan yang ditemukan belum menunjukkan kondisi ekstrem. Akan tetapi, kesimpulan tersebut berubah ketika biaya tenaga kerja keluarga diperhitungkan. Porsi Value Added petani turun menjadi 48,2% dan Inequality Index meningkat menjadi 1,074, sehingga pendapatan pelaku hilir secara agregat sedikit melampaui pendapatan petani. Sensitivitas ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap posisi ekonomi petani sangat bergantung pada kelengkapan komponen biaya yang dimasukkan dalam analisis.

Temuan tersebut memiliki kemiripan metodologis dengan Velázquez-Torres et al. (2025) yang menunjukkan bahwa biaya faktor produksi, khususnya tenaga kerja, dapat menentukan interpretasi terhadap efisiensi dan profitabilitas suatu usaha pertanian. Pada usaha tani mawar yang mereka kaji, penggunaan tenaga kerja yang intensif menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efisiensi ekonomi, sehingga hasil penilaian dapat berbeda ketika seluruh faktor produksi diperhitungkan. Dalam konteks yang berbeda, Kassa et al. (2026) juga menunjukkan bahwa kelayakan ekonomi kegiatan pertanian tidak cukup dinilai hanya dari penerimaan langsung, karena tingginya biaya produksi dan berbagai biaya yang melekat pada proses produksi dapat mengubah kesimpulan mengenai keberlanjutan usaha. Walaupun komoditas yang diteliti berbeda, kedua penelitian tersebut memperkuat argumen bahwa ukuran keuntungan atau nilai tambah yang hanya didasarkan pada pengeluaran tunai dapat memberikan gambaran yang lebih optimistis dibandingkan ketika seluruh biaya ekonomi diperhitungkan.

Gambar 4 merangkum posisi ketiga simpul rantai pasok pada tiga dimensi sekaligus berdasarkan biaya produksi tunai, yaitu kontribusi terhadap total Value Added, kontribusi kumulatif terhadap harga konsumen, dan rasio Value Added terhadap harga yang diterima pada masing-masing simpul. Dimensi ketiga penting karena menunjukkan seberapa besar proporsi harga yang diterima setiap simpul yang benar-benar merupakan nilai tambah baru, bukan sekadar penerusan biaya dari simpul sebelumnya. Pola tersebut menunjukkan bahwa besarnya

penerimaan bruto suatu pelaku tidak dapat secara langsung disamakan dengan besarnya nilai ekonomi yang diciptakan oleh pelaku tersebut.



Gambar 4. Posisi Multidimensi Tiga Simpul Rantai Pasok Beras

Pola pada Gambar 4 memperlihatkan bahwa meskipun petani menerima porsi harga kumulatif sebesar 60,0% dari harga konsumen, petani memiliki rasio *Value Added* terhadap harga yang paling tinggi, yaitu 73,5%, dibandingkan penggilingan sebesar 27,7% dan pedagang sebesar 9,0%. Artinya, dari setiap rupiah yang diterima petani, sebagian besar merupakan nilai tambah usaha tani, sedangkan pada penggilingan dan pedagang terdapat proporsi biaya dari simpul sebelumnya yang lebih besar. Namun, setelah biaya tenaga kerja keluarga diimputasikan, rasio *Value Added* terhadap harga petani turun menjadi 53,0%. Petani tetap mempunyai rasio tertinggi, tetapi selisihnya terhadap pelaku hilir menjadi lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja keluarga tidak tepat dianggap sebagai sumber daya ekonomi tanpa biaya hanya karena tidak menghasilkan arus kas keluar secara langsung.

Pentingnya tenaga kerja sebagai input ekonomi juga terlihat pada penelitian Sun et al. (2026). Penelitian tersebut menemukan bahwa perubahan alokasi tenaga kerja rumah tangga melalui pekerjaan di luar usaha tani berhubungan dengan perubahan produktivitas hijau pertanian, dan pengaruhnya semakin kuat ketika proporsi pendapatan nonpertanian meningkat. Meskipun indikator yang digunakan berbeda dengan penelitian ini, hasil tersebut menegaskan bahwa alokasi tenaga kerja rumah tangga merupakan bagian substantif dari kinerja ekonomi usaha tani dan tidak seharusnya diabaikan dalam evaluasi keberlanjutan pertanian. Dengan

demikian, penurunan *Value Added* petani setelah imputasi tenaga kerja keluarga dalam penelitian ini bukan sekadar konsekuensi matematis, tetapi menggambarkan pentingnya memasukkan biaya peluang sumber daya rumah tangga dalam menilai posisi ekonomi petani secara lebih komprehensif.

Ketidaksesuaian antara ekspektasi teori dan temuan empiris dapat dimaknai melalui beberapa aspek. Pertama, secara substantif, hasil pada basis biaya tunai mengindikasikan bahwa mekanisme pasar gabah di lokasi penelitian belum tentu mengalami *market failure* separah yang diasumsikan teori. Hal tersebut berarti persoalan kesejahteraan petani tidak dapat dijelaskan hanya melalui perbedaan harga dan margin antara hulu dan hilir. Kesejahteraan masyarakat perdesaan merupakan fenomena yang lebih multidimensional. Gai et al. (2025) menunjukkan pada konteks perdesaan Indonesia bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap modal ekonomi, infrastruktur, layanan keuangan, sumber daya, dan dimensi penghidupan lainnya. Temuan tersebut memberikan konteks penting bahwa *Farmer's Share* atau *Value Added* yang relatif tinggi tidak serta-merta menunjukkan bahwa rumah tangga petani telah memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Kedua, secara metodologis, ketidaksesuaian dengan teori dapat dipengaruhi oleh keterbatasan cakupan dan ukuran sampel penelitian. Ketiga, dan yang paling penting, analisis sensitivitas menunjukkan bahwa kesimpulan “petani tidak dirugikan” sangat bergantung pada perlakuan terhadap biaya tenaga kerja keluarga. Ketika tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar tunai diimputasikan menggunakan upah acuan setempat, porsi *Value Added* petani turun dari 56,4% menjadi 48,2% dan *Inequality Index* berubah dari 0,774 menjadi 1,074. Dengan demikian, temuan empiris kembali mendekati ekspektasi teori awal setelah biaya faktor produksi yang sebelumnya tersembunyi diperhitungkan. Temuan ini perlu dimaknai sebagai indikasi awal yang sensitif terhadap basis biaya dan bukan sebagai bukti yang menggugurkan kerangka teori *market failure* secara keseluruhan.

Perspektif tersebut juga sejalan dengan perkembangan penelitian pertanian dan pembangunan perdesaan. Kajian bibliometrik Nugraha et al. (2026) menunjukkan bahwa penelitian pembangunan pertanian telah berkembang dari fokus yang semata-mata bersifat teknis menuju pendekatan yang mencakup *sustainable rural livelihoods*, diversifikasi sumber pendapatan, inovasi digital, dan pengelolaan rantai pasok. Perkembangan tersebut memperkuat pandangan bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup dicapai hanya melalui peningkatan produksi atau perbaikan harga, tetapi juga membutuhkan penguatan akses pasar, kelembagaan, teknologi, dan kapasitas adaptasi masyarakat perdesaan.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keadilan dalam rantai pasok tidak dapat dievaluasi hanya melalui besarnya nilai tambah yang diterima masing-masing pelaku. Dindar (2026) menekankan bahwa keberlanjutan sektor agrifood memiliki dimensi yang saling berkaitan, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, sosial, tata kelola rantai nilai, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perbedaan hasil antara basis biaya tunai dan basis biaya yang mengimputasikan tenaga kerja keluarga justru menunjukkan pentingnya menggunakan pendekatan multidimensi untuk menilai keberlanjutan rantai pasok beras. Distribusi nilai yang terlihat relatif seimbang secara finansial dapat menyembunyikan penggunaan sumber daya rumah tangga yang tidak tercatat sebagai transaksi tunai.

Temuan penelitian ini juga dapat diperbandingkan dengan penelitian Ritonga et al. (2026) pada industri beras di Kabupaten Pidie, Aceh. Penelitian tersebut menghitung *Farmer's Share* secara bertahap pada setiap simpul rantai pasok dan menemukan bahwa *Farmer's Share* tinggi pada tahap petani–pengumpul, yaitu 94,3%, tetapi turun menjadi 44,0% pada tahap pengumpul–penggilingan. Studi tersebut menyimpulkan bahwa inefisiensi rantai pasok beras tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan kelemahan kelembagaan, asimetri informasi, lemahnya koperasi tani, dan keterbatasan infrastruktur pascapanen. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian di Kabupaten Sukabumi, di mana persoalan yang konsisten ditemukan justru berada pada kelembagaan lokal, terutama rendahnya pengetahuan dan keterlibatan petani terhadap BUMDes.

Temuan mengenai BUMDes memperoleh dukungan tambahan dari Tarlani et al. (2022). Dalam studi pada tiga desa di Indonesia, BUMDes diposisikan sebagai institusi yang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga melalui penciptaan keterkaitan ekonomi ke belakang dan ke depan (*backward and forward linkages*). Walaupun penelitian tersebut dilakukan pada pengembangan ekonomi berbasis pariwisata desa dan bukan rantai pasok beras, prinsip kelembagaannya relevan dengan penelitian ini. BUMDes berpotensi tidak hanya berfungsi sebagai pembeli gabah, tetapi sebagai penghubung antara produksi petani, pengolahan, akses pasar, dan dukungan pemerintah daerah. Dengan demikian, rendahnya pengetahuan 70% petani mengenai keberadaan BUMDes merupakan kesenjangan kelembagaan yang penting, mengingat seluruh BUMDes yang disurvei dalam penelitian ini justru menyatakan kesiapan menjadi *offtaker* gabah.

Perbedaan utama penelitian ini dengan Ritonga et al. (2026) terletak pada pendekatan pengukuran. Ritonga et al. menghitung *Farmer's Share* secara bertahap antarsimpul dalam satuan produk yang sama, sedangkan penelitian ini membandingkan *Farmer's Share* Tidak

Disesuaikan dengan *Farmer's Share* Disesuaikan (Setara Beras) untuk memperlihatkan pengaruh transformasi fisik gabah menjadi beras. Penelitian ini juga menambahkan analisis sensitivitas biaya tenaga kerja keluarga sehingga dapat memperlihatkan bahwa kesimpulan mengenai distribusi nilai berubah berdasarkan batasan biaya yang digunakan. Konvergensi temuan dari berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa masalah rantai pasok pertanian tidak dapat direduksi menjadi persoalan harga semata, tetapi merupakan interaksi antara struktur biaya, pembentukan nilai tambah, posisi tawar, akses pasar, dan kapasitas kelembagaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan empiris yang pada awalnya tampak bertentangan dengan ekspektasi teori sebenarnya lebih bersifat kondisional. Pada basis arus kas, petani terlihat sebagai pelaku dengan penciptaan nilai tambah terbesar; ketika biaya ekonomi tenaga kerja keluarga diperhitungkan, keunggulan tersebut menyempit dan pendapatan agregat pelaku hilir sedikit melampaui petani. Pada saat yang sama, rendahnya keterhubungan petani dengan BUMDes menunjukkan bahwa persoalan struktural tetap ada meskipun ketimpangan harga tidak ekstrem. Dengan demikian, penguatan kelembagaan lokal, peningkatan akses pasar, pencatatan biaya usaha tani yang lebih lengkap, serta pembangunan hubungan yang lebih kuat antara petani, BUMDes, penggilingan, dan pasar menjadi lebih relevan daripada intervensi yang hanya berfokus pada perubahan harga. Bukti dari penelitian sebelumnya juga mengarah pada kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi pertanian berkelanjutan membutuhkan kombinasi antara efisiensi ekonomi, pengakuan terhadap seluruh faktor produksi, akses terhadap sumber daya, dan kelembagaan perdesaan yang mampu menghubungkan produsen dengan peluang penciptaan nilai yang lebih besar (Dindar, 2026; Gai et al., 2025; Nugraha et al., 2026; Tarlani et al., 2022; Velázquez-Torres et al., 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan empat hal utama. Pertama, pada basis biaya produksi tunai, petani menerima porsi Value Added terbesar dalam rantai pasok beras di Kabupaten Sukabumi, yaitu sebesar 56,4 persen dari total nilai tambah, diikuti oleh penggilingan sebesar 32,1 persen dan pedagang sebesar 11,5 persen. Kedua, *Farmer's Share* bernilai 38,9 persen jika dihitung tanpa penyesuaian berdasarkan harga gabah aktual yang diterima petani, dan bernilai 60,0 persen jika dihitung menggunakan konversi setara beras (d disesuaikan); selisih ini menegaskan pentingnya membedakan nilai tunai riil dari nilai imputasi hasil konversi. Ketiga, dan ini merupakan temuan yang paling penting secara metodologis, kesimpulan di atas sangat sensitif terhadap perlakuan biaya tenaga kerja keluarga: setelah biaya tenaga kerja keluarga yang tidak

dibayar tunai diimputasikan, porsi Value Added petani turun menjadi 48,2 persen dan Inequality Index berbalik dari 0,774 menjadi 1,074, sehingga pendapatan pelaku hilir justru sedikit melampaui pendapatan petani. Keempat, terlepas dari basis perhitungan yang digunakan, kendala nyata yang ditemukan pada rantai pasok ini bersifat kelembagaan, yaitu rendahnya pengetahuan dan kepercayaan petani terhadap BUMDes sebagai calon mitra pemasaran. Mengingat keterbatasan ukuran sampel, cakupan wilayah, dan sensitivitas hasil terhadap basis perhitungan biaya, keempat temuan ini bersifat indikatif dan perlu diuji lebih lanjut pada skala yang lebih luas serta menggunakan data curahan tenaga kerja keluarga yang lebih rinci.

Temuan ini mengindikasikan bahwa persoalan utama pada rantai pasok beras di Kabupaten Sukabumi bukan terletak pada ketimpangan harga yang ekstrem, melainkan pada lemahnya kelembagaan lokal. Sebanyak 70 persen petani belum mengetahui keberadaan BUMDes sebagai calon mitra pemasaran, padahal seluruh BUMDes yang disurvei menyatakan kesediaannya menjadi offtaker gabah.

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah dan BUMDes memperkuat sosialisasi kelembagaan kepada petani, memberikan kepastian pasar, serta menyediakan dukungan permodalan agar BUMDes dapat berperan optimal sebagai penghubung antara petani, penggilingan, dan pasar. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data transaksi yang tertelusur (traced) dari petani yang sama hingga ke konsumen akhir, serta data time series untuk memungkinkan analisis elastisitas transmisi harga secara ekonometrik.

Secara keseluruhan, penguatan kelembagaan lokal berbasis BUMDes merupakan langkah strategis untuk mewujudkan hilirisasi beras yang berkeadilan. Langkah ini sejalan dengan agenda pembangunan pertanian berkelanjutan, karena tidak hanya meningkatkan efisiensi rantai pasok, tetapi juga memastikan petani sebagai produsen utama tetap menjadi penerima manfaat utama dari nilai ekonomi yang mereka hasilkan.

DAFTAR REFERENSI

- Bahri, T. S., Hakim, D. B., Juanda, B., & Sahara, S. (2021). Determinants of performance and structural relationships of rice processing industry performance: Resources based view approach. *Quality Innovation Prosperity*, 25(3), 18–32. <https://doi.org/10.12776/qip.v25i3.1587>
- Balanay, R. M., & Guinancias, A. R. (2025). Streamlining a short supply chain for increased agricultural resilience and global market opportunities: The case of lemongrass (*Cymbopogon citratus*) in Caraga Region, Philippines. *Agricultural and Food Economics*, 13(1), 41. <https://doi.org/10.1186/s40100-025-00385-3>

- Chuma, B. L., Thomas, B., & Togarepi, C. (2026). Smallholder farmers' perceptions of cattle contract farming in the Northern communal areas of Namibia. *Cogent Food & Agriculture*, 12(1), 2621451. <https://doi.org/10.1080/23311932.2026.2621451>
- Dindar, E. (2026). TSRS-aligned sustainability reporting in Turkey's agri-food sector: A qualitative content analysis based on GRI 13 and the SDGs. *Sustainability*, 18(2), 1085. <https://doi.org/10.3390/su18021085>
- Gai, A. M., Ernan, R., Barus, B., & Fauzi, A. (2025). Composite index of poverty based on sustainable rural livelihood framework: A case from Manggarai Barat, Indonesia. *Geographies*, 5(4), 58. <https://doi.org/10.3390/geographies5040058>
- Hidayati, D. R., Garnevskaya, E., & Childerhouse, P. (2023). Enabling sustainable agrifood value chain transformation in developing countries. *Journal of Cleaner Production*, 395, 136300. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136300>
- Jusni, J. A., & Aswan, A. (2021). The choice of a marketing channel to benefit corn producer's welfare in Indonesia. *Innovative Marketing*, 17(2), 45–57. [https://doi.org/10.21511/im.17\(2\).2021.05](https://doi.org/10.21511/im.17(2).2021.05)
- Kassa, G., Sangha, K. K., Murphy, B. P., & Mazhar, M. S. (2026). Challenges and prospects of cotton farming in the tropics: Lessons for northern Australia. *Journal of Cotton Research*, 9(1), 2. <https://doi.org/10.1186/s42397-025-00249-7>
- Mhando, D. G. (2026). Transforming smallholder orange farming in Tanzania: Institutional constraints and sustainability pathways in Muheza District. *Cogent Food & Agriculture*, 12(1), 2634429. <https://doi.org/10.1080/23311932.2026.2634429>
- Ndwandwe, N., Dumisa, B. M., Tabalaza, P., Ntshangase, N., Sibanda, M., & Khumalo, N. Z. (2026). Home-grown indigenous vegetables and risk mitigation strategies for enhancing food and nutrition security among small-scale farming households: A systematic review. *Sustainability*, 18(3), 1176. <https://doi.org/10.3390/su18031176>
- Nugraha, H., Purwanto, E., Christian, M., & Rembulan, G. D. (2026). The evolution of research in agricultural technology and rural development: A bibliometric analysis. *Journal of Global Innovation in Agricultural Sciences*, 14(1), 175–192. <https://doi.org/10.22194/JGIAS/26.1697>
- Ritonga, Z., Sepriani, Y., Mulyadi, Muchsin, Zalikha, & Yusuf, M. (2026). Institutional reform for equitable value distribution in the rice industry of Aceh, Indonesia. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 13(1), 629–637. <https://doi.org/10.14419/ygm6k40>
- Ruspayandi, T., Bantacut, T., Arifin, B., & Fahmi, I. (2022). Market-approach-based policy to achieve rice price stability in Indonesia—Can it be a complement? *Economies*, 10(12), 296. <https://doi.org/10.3390/economies10120296>
- Sun, X., Fan, X., Liu, Q., & Lyu, J. (2026). Balancing livelihoods and sustainable development: How does off-farm employment affect agricultural green total factor productivity in China? *Sustainability*, 18(1), 155. <https://doi.org/10.3390/su18010155>
- Tarlani, T., Dariah, A. R., & Rani, A. M. (2022). Transforming rural economy through community-based tourism with village-owned enterprise (BUMDES, Badan Usaha Milik Desa): A case study Cibiru Wetan, Pagerwangi and Cipamekar Villages, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(5), 1535–1542. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170517>

- Velázquez-Torres, A. L., Martínez-Castañeda, F. E., Callejas-Juárez, N., Rogers-Montoya, N. A., Herrera-Tapia, F., Hernandez, E., & Thomé-Ortiz, H. (2025). Sustainability and competitiveness of Mexican rose production for export: A policy analysis matrix approach assessing economic and social dimensions. *Sustainability*, 17(24), 11289. <https://doi.org/10.3390/su172411289>
- Yigezu, Y. W., Sidell, Z. S., & Astatkie, T. (2026). Profitability drivers of carrot farming and its implications on food security of smallholder farmers in Northwest Ethiopia. *Discover Food*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.1007/s44187-025-00747-2>
- Zinyoro, E., Mwadzingeni, L., & Leonah, D. M. (2025). Assessment of market barriers amongst the indigenous vegetable vendors in the city of Tshwane, Gauteng Province, South Africa. *Discover Sustainability*, 6(1), 1198. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-02113-9>